

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dibentuk dari perbedaan, berbagai tradisi yang berasal dari peradaban kuno hadir dalam bangsa baru yang memiliki potensi tanpa bandingan. Pada tahun 1990, Indonesia berpenduduk 180 juta jiwa. dari segi itu terlihat perbedaan mencolok, sebab 60% penduduk Indonesia terpusat di Jawa yang luasnya hanya 7% dari seluruh wilayahnya. Meskipun program keluarga berencana menunjukkan keberhasilan, penduduk Jawa tetap bertambah dengan pesat.<sup>1</sup>

Bukan hanya permasalahan ketimpangan penduduk di Jawa dengan luar Jawa, permasalahan lahan kritis yang sering dihadapi di desa-desa di Jawa juga butuh solusi. Setidaknya setiap tahun Jawa mengalami lahan kritis lebih dari 200.000 hektar.<sup>2</sup>

Keadaan yang serba timpang tersebut butuh penyelesaian yang sekiranya akan bisa menjadi jalan keluar yang bijaksana. Transmigrasi menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut. Transmigrasi yang berarti memindahkan penduduk telah menjadi pilihan pemerintah ahkan sejak zaman kolonial Belanda. Perbedaan dari program yang diusung pemerintah Belanda dan yang kemudian dilanjutkan pemerintah Indonesia adalah pada masa pemerintahan kolonial

---

<sup>1</sup> Patrice Levang. *Ayo Ke Tanah Sebrang*. Penerjemah Sri Ambar Wahyuni Prayoga. Jakarta: KPG, 2003. Hal 3

<sup>2</sup> *Ibid.* Hal 5

Belanda program tersebut lebih dikenal dengan sebutan ‘koloni’, orang Belanda menyebutnya *Kolonisatie*. Program ini sendiri lahir sebagai bagian dari kebijakan yang diambil pemerintah Belanda yang dikenal dengan *Ethische Politiek*<sup>3</sup>. Kemudian setelah Indonesia merdeka ‘transmigrasi’ berhasil menggantikan ‘kolonisatie’ tepatnya dalam tahun 1947, hal ini ditandai dengan dibentuknya panitia yang mempelajari program serta pelaksanaan transmigrasi yang diketuai oleh A.H.D Tambunan. Namun keputusan menyangkut transmigrasi baru diambil pada 1950, dan pada bulan Desember pemberangkatan dilaksanakan menuju Sumatera Selatan.<sup>4</sup>

Selain penamaan, program *kolonisatie* yang digalakkan Belanda dengan transmigrasi yang diusung pemerintah Indonesia juga memiliki perbedaan dari segi maksud dan tujuan dilaksanakannya program tersebut. *Kolonisatie* dilakukan oleh Belanda bertujuan memindahkan penduduk Jawa yang dianggap terlalu padat ke daerah luar Jawa yang berpenduduk sedikit. Dalam hal ini tujuan tersebut masih sama dengan transmigrasi-nya pemerintah Indonesia, namun disamping penanganan ketidakmerataan penduduk tersebut Belanda ‘menyisipkan’ tujuan lain yaitu untuk mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya yang diperoleh dari usaha dan kerja keras buruh yang dibayar dengan murah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Berawal dari munculnya golongan liberal Belanda yang menyakini ‘kewajiban moral’ yaitu *Etichi* ( Van Deventer, Van Kol, dan Brooschoft). Mereka mengemukakan bahwa Belanda mempunyai ‘hutang budi’ terhadap Indonesia yang menjadi jajahan mereka sebab telah menjadi sumber penghasilan bagi kerajaan. Gerakan inilah yang kemudian memunculkan *Ethische Politiek* sejak 1900. Gerakan ini mengusung semboyan pendidikan, irigasi, dan migrasi. Bagian ketiga itulah yang menjadikan *kolonisatie* pada tahun 1905 menjadi cikal bakal transmigrasi.

<sup>4</sup> Nugraha Setiawan. *Satu Abad Transmigrasi Di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-2005*.

<sup>5</sup> Eni May. *Potret 3 Desa Transmigrasi Orang Jawa: Studi Kasus di Desa Tongar, Koja, dan Desa Baru Pasaman Sumatera Barat Laporan Penelitian*. Padang: Universitas Andalas, 2006, Hal. 3

Sementara itu, program transmigrasi pemerintah Indonesia selain bertujuan untuk memindahkan penduduk sebagai jawaban ketidakmerataan penduduk, juga dimaksudkan untuk perluasan lahan pertanian, peningkatan produksi pangan dan swasemada beras, bahkan pada masa memasuki rezim militer transmigrasi juga dimaksudkan untuk pembangunan kesatuan dan persatuan bangsa serta pertahanan dan keamanan bangsa.<sup>6</sup>

Daerah yang menjadi penerima transmigrasi di luar Jawa untuk pertama kalinya adalah Gedong Tataan di Lampung Selatan. Pada tahun 1905, sebanyak 155 Kepala Keluarga (KK) transmigran didatangkan ke Lampung dengan nama *kolonisatie* pertama bernama 'Bagelen'.<sup>7</sup> Selain Lampung, Kalimantan dan Sulawesi juga dijadikan daerah penerima transmigrasi. Di Kalimantan misalnya adalah di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Lampake Jaya.<sup>8</sup> Sementara di Sulawesi ada pemukiman transmigran bernama Sidomukti yang terletak di Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>9</sup> Sementara di Pulau Sumatera tersebar di hampir seluruh provinsi mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat hingga Lampung.

Sumatera Barat merupakan daerah transmigrasi di Pulau Sumatera selain Lampung, Bengkulu, Riau, dan lain-lain. Beberapa daerah di Sumatera Barat yang dijadikan tempat pemukiman transmigrasi adalah Kabupaten Pasaman misalnya di Kinali yang mulai dimasuki transmigran pada tahun 1962<sup>10</sup>,

---

<sup>6</sup> Patrice Levang. *Op.cit* hal 18

<sup>7</sup> Patrice Levang. *Op.cit* hal 9

<sup>8</sup> Chodidah Budi Raharjo. Benturan Sosial dan Budaya di Daerah Transmigrasi. Dalam ed Rukmadi Warsito, *at al. Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*. Jakarta: Rajawali. 1984. Hal 154

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal 161

<sup>10</sup> Syafaruddin. Sejarah Transmigrasi Di Kinali Kabupaten Pasaman Barat 1962-1974. *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas

Sawahlunto/Sijunjung misalnya Sitiung yang mejadi pemukiman baru bagi masyarakat Wonogiri yang harus dipindahkan akibat dilakukannya pemangunan waduk gajah Mungkur.<sup>11</sup> Ada pula di Kabupaten Pesisir Selatan misalnya di Kenagarian Lunang pada tahun 1973<sup>12</sup>.

Program transmigrasi ke Sumatera Barat telah terjadi sejak tahun 1936. Orang Jawa yang datang ini berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka dipekerjakan di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Ophir Kinali. Pada tahun 1941, didatangkan lagi orang Jawa dari Jawa Timur untuk menempati daerah baru di Pasaman. Mereka ditempatkan di daerah Batahan, di desa yang bernama Baharoe.<sup>13</sup>

Fokus pembahasan tulisan ini sendiri adalah transmigran di Sumatera Barat tepatnya transmigrasi yang ditempatkan di Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. Transmigrasi di Sijunjung bersifat umum dan pesertanya berasal dari Pulau Jawa, diantaranya dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Transmigrasi ini digolongkan ke dalam transmigrasi umum karena seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah, mulai dari ongkos pemberangkatan hingga tunjangan hidup selama satu tahun, termasuk perlengkapan untuk pertanian.

Hal menarik dalam sejarah transmigrasi di Nagari Kamang adalah keikutsertaan masyarakat sekitar penempatan transmigrasi dalam lokasi transmigrasi. Memang sejak arus transmigrasi bergulir kekhawatiran akan

---

<sup>11</sup> Efrianto. *Kehidupan Transmigran di Sitiung 1976-1986*. Dalam Suluah, Vol.11. Desember, 2011. Hal 80

<sup>12</sup> Mariana. *Transmigrasi di Kenagarian Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 1973-1995*. *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas

<sup>13</sup> Eni May, *loc.cit*

terbentuknya ‘enklave’ Departemen Transmigrasi telah memutuskan untuk melibatkan penduduk asli daerah transmigrasi dalam program yaitu sebesar 10% yang disebut dengan APPDT (Alokasi Penempatan Penduduk Daerah Transmigrasi).<sup>14</sup> Menarik dilihat dari model pembagian lokasi untuk transmigran asal Jawa dan masyarakat asli yang tergolong dalam kelompok APPDT, yaitu selang-seling.<sup>15</sup> Sehingga dengan pembagian semacam itu terjalinlah hubungan yang baik tidak hanya transmigran yang sama-sama berasal dari Jawa tetapi juga dengan masyarakat Minangkabau yang diikutserakan.

## **B. Batasan dan Perumusan Masalah**

Batasan spasial pada penelitian ini adalah Nagari Kamang, yang merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. Nagari Kamang saat pertama kali di bukanya UPT adalah bagian dari Kecamatan Pembantu Tanjung Gadang di bawah Kabupaten Sawahluntu/Sijunjung sebelum pemekaran daerah Dharmasraya yang terjadi pada tahun 2004 silam disusul pemekaran Sawahlunto kemudian pada tahun 2008.

Nagari Kamang merupakan nagari di Kecamatan Kamang Baru yang memiliki daerah penempatan transmigran dalam beberapa UPT. Setelah kebijakan kembali ke nagari, UPT yang ada lebih dikenal dengan Jorong Timpeh Makmur, Jorong Kurnia Kamang, Jorong Kamang abadi, Jorong Kamang Bhakti dan Jorong Kamang Sejahtera yang merupakan pecahan dari Jorong Kurnia Kamang.

---

<sup>14</sup> Patrice Levang. *Op.cit* hal 31

<sup>15</sup> Wawancara dengan Mudawama di Jorong Batang Kariang pada tanggal 25 September 2014

Batasan temporal yang diambil yaitu tahun 1993-2014. Tahun 1993 diambil sebagai batasan awal karena pada awal tahun ini transmigrasi ke Nagari Kamang dimulai dengan didatangkannya sejumlah KK dari Jawa pada tanggal 4 Januari 1993.<sup>16</sup> Tanggal 4 Januari merupakan kedatangan rombongan pertama termasuk di antara keluarga yang datang adalah keluarga Sardi dan Keluarga Kaminten<sup>17</sup> yang sama-sama berasal dari Cirebon Jawa Barat, kemudian disusul oleh rombongan berikutnya pada bulan-bulan selanjutnya.

Kemudian, tahun 2007 dijadikan sebagai batasan akhir sebab pada tahun tersebut terjadi pergantian nama atas jorong-jorong di daerah transmigrasi. Jika pada awalnya setiap jorong dinamai dengan kata “Timpeh”, seperti halnya Timpeh Makmur maka pada tahun 2007 sudah mulai digunakan kata “Kamang”, seperti Kamang Makmur, Kurnia Kamang, Kamang Bakti, dll.

Untuk lebih memfokuskan tulisan ini dan untuk menghindari cakupan masalah yang terlalu luas, maka perlu dirumuskan beberapa masalah yang akan di bahas, yaitu:

1. Mengapa Nagari Kamang dijadikan penempatan transmigran?
2. Bagaimana kehidupan awal masyarakat transmigran setelah menempati lokasi transmigrasi?
3. Bagaimana interaksi yang terjadi antara sesama transmigran di lokasi dan dengan etnis berbeda?
4. Bagaimana bentuk adaptasi yang dilakoni transmigran dengan penduduk sekitar lokasi transmigrasi?

---

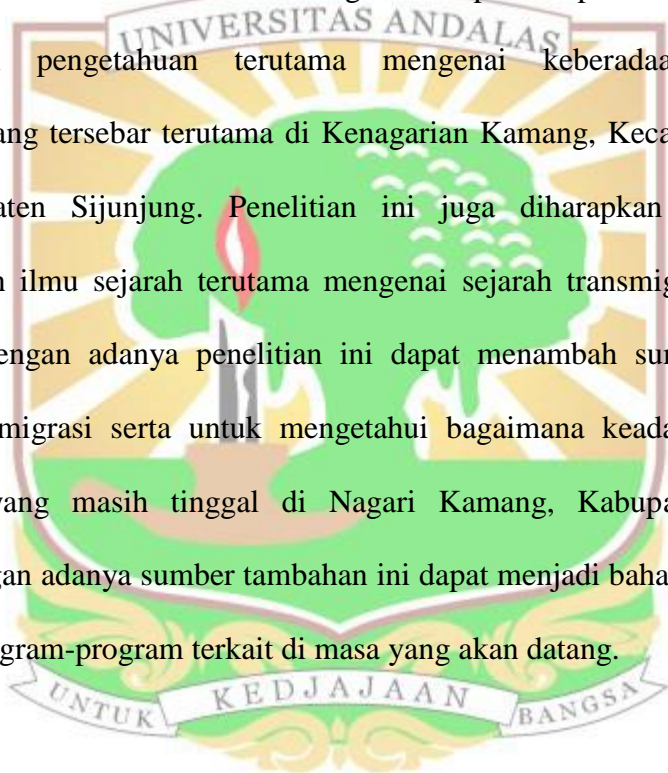
<sup>16</sup>Kartu Tanda Pengenal Transmigran, Sardi asal Cirebon Jawa Barat

<sup>17</sup> Kartu Tanda Pengenal Transmigran, Kaminten asal Cirebon Jawa Barat

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang menjadi latar belakang pemilihan Nagari Kamang sebagai lokasi penempatan transmigran, menjelaskan bagaimana kehidupan awal masyarakat transmigrasi setelah menempati lokasi transmigrasi, juga mengenai interaksi yang terjadi antara sesama transmigran dan dengan penduduk asli di sekitar lokasi transmigrasi.

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan terutama mengenai keberadaan masyarakat transmigran yang tersebar terutama di Kenagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu sejarah terutama mengenai sejarah transmigrasi Indonesia. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah sumber mengenai masalah transmigrasi serta untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat transmigran yang masih tinggal di Nagari Kamang, Kabupaten Sijunjung. Sehingga dengan adanya sumber tambahan ini dapat menjadi bahan pertimbangan pula untuk program-program terkait di masa yang akan datang.



### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Studi Relevan**

Pembahasan mengenai transmigrasi telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Di antaranya, oleh Joan Hardjono dengan judul “Transmigrasi Umum

dan Swakarsa dalam Konteks Target-target Pelita III”<sup>18</sup>. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa target-target dari program transmigrasi sangat diharapkan oleh pemerintah, bahkan pada masa Pelita III pernah ditargetkan akan memindahkan setengah juta KK dari pedesaan Jawa. Hal ini tentu bukan tanpa sebab, dapat dikatakan kehidupan banyak rumah tangga di pedesaan Jawa sangat memprihatinkan. Pada tahun 1976 saja diketahui sebanyak 5,8 juta rumah tangga tak memiliki tanah. Sementara 5,7 juta lainnya memiliki tanah namun hanya sekitar 0,5 Ha per KK.

Selain itu, menurut Joan memasuki Pelita III masalah terkait program transmigrasi mulai menimbang beberapa hal yang pada program sebelumnya belum terlalu diperhitungkan. Yang pertama, yaitu permasalahan buruknya lingkungan di pedesaan Jawa. Kedua, makin besarnya kemungkinan timbulnya keresahan sosial seperti yang terjadi di Jenggawah selama tahun 1979. Dikatakan pula bahwa transmigrasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya keresahan dan gejolak sosial di daerah padat penduduk sebagai akibat taraf hidup yang rendah serta angka pengangguran.

Berikutnya yang ditulis oleh Chodidah Budi Raharjo, berjudul ‘Benturan sosial dan budaya di daerah pemukiman transmigrasi’.<sup>19</sup> Chodidah menjelaskan bahwa dalam pemukiman transmigrasi benturan antara pendatang dengan yang ‘didatangi’ tak kan dapat terhindarkan, bahkan antara para transmigran yang berasal dari daerah yang sama sekalipun.

---

<sup>18</sup> Joan Hardjono, *Transmigrasi Dari Kolonisasi Sampai Swakarsa*. Jakarta: Gramedia, 1982.

<sup>19</sup> Chodidah Budi Raharjo. *Benturan Sosial dan Budaya di Daerah Transmigrasi*. Dalam ed Rukmadi Warsito, *at al. Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*. Jakarta: Rajawali. 1984.



Permasalahan yang muncul dalam pemukiman transmigrasi tak lain adalah karena perbedaan sistem budaya yang dianut oleh masing-masing etnik yang terlibat dalam program transmigrasi. Sistem nilai budaya itu sendiri dapat berupa norma-norma yang dianut dalam kehidupan bermasyarakat. Diantara norma-norma tersebut yang seringkali memberi sumbangsih dalam menyemai pertikaian di daerah transmigrasi adalah ekonomi, sosial, dan agama.

Perbedaan sistem budaya tersebut menurut Chodidah dapat diminimalisir dengan cara penyeleksian calon transmigran yang akan diberangkatkan. Misalnya untuk daerah dengan ketaatan agama islam yang masih kuat seperti di Aceh maka perlu dipilih transmigran yang juga taat ataupun mereka yang dinilai dapat menerima dan berbaur dengan norma semacam itu. Dan, untuk transmigran yang beragama kristen dapat ditempatkan di daerah transmigrasi yang juga penduduk setempatnya mayoritas beragama sama. Dalam hal ini menurut Chodidah, peran dan kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi keharmonisan di daerah transmigrasi. Juga, hal seperti penyuluhan awal sebelum keberangkatan dinilai sebagai langkah yang baik sebelum memberangkatkan transmigran terutama pengenalan budaya daerah yang akan ditempati transmigran atau yang dikenal dengan istilah orientasi kultural.

Pembahasan mengenai transmigrasi di Sumatera Barat pun sudah cukup banyak dilakukan, sebagai contoh yaitu skripsi yang ditulis oleh Mariana, mahasiswa Universitas Andalas Padang yaitu transmigrasi di Lunang, Kabupaten

Pesisir Selatan 1973-1985.<sup>20</sup> Dalam skripsi tersebut, Mariana menjabarkan banyak hal mulai dari kehidupan awal transmigrasi hingga pembauran yang terjadi antara etnis yang terlibat yaitu etnis Minangkabau dan Jawa.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Syafaruddin, mengenai transmigrasi di Kinali Pasaman Barat pada tahun 1962-1974<sup>21</sup>. Dalam skripsinya Syafaruddin banyak menjelaskan tentang bagaimana prosedur yang dilalui oleh masyarakat Jawa untuk mengikuti program transmigrasi. Berbagai kesulitan yang mereka temui termasuk setelah sampai di Sumatera Barat, utama masalah transportasi yang masih sangat mengkhawatirkan pada masa itu.

Selain itu Syafaruddin juga menjelaskan tentang proses adaptasi yang tak jarang diwarnai konflik bahkan antara sesama transmigran. Juga, bagaimana perkembangan hubungan dengan masyarakat asli di sekitar lokasi yang terjalin bahkan melalui perkawinan, gotong royong, dll.

Berikutnya, skripsi yang ditulis oleh Ocky Setiawan yaitu mengenai transmigrasi lokal di Nagari Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 1988-2000<sup>22</sup>. Bedanya adalah transmigrasi yang diteliti adalah transmigrasi yang dilaksanakan akibat terjadinya bencana alam di Nagari Salido dan sekitarnya, sehingga mereka yang mengalami musibah perlu mendapat tempat tinggal baru yang tidak berpotensi bencana. Transmigrasi semacam ini disebut juga transmigrasi lokal sebab peserta transmigrannya bukanlah masyarakat dari luar

---

<sup>20</sup> Mariana. Transmigrasi Di Kenagarian Lunang Pesisir Selatan Sumatera Barat 1973-1985. *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas

<sup>21</sup> Syafaruddin. Sejarah Transmigrasi Di Kinali Kabupaten Pasaman Barat 1962-1974. *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas

<sup>22</sup> Ocky Setiawan. Transmigrasi Lokal di Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 1988-2000. *Skripsi*. Universitas Andalas. 2005

daerah misalnya Jawa, melainkan masyarakat Salido yang masih merupakan satu etnis yang sama, yaitu Minangkabau.

Tulisan lainnya yaitu, skripsi oleh Reza Junaidi. Mengenai penempatan transmigrasi di Kecamatan Rimbo Bujang tahun 1975-2004<sup>23</sup>. Dalam skripsi tersebut dapat diketahui bagaimana prosedur yang dilalui oleh calon transmigran hingga akhirnya sampai di lokasi transmigrasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai kesulitan yang dialami oleh para transmigran. Dijelaskan pula mengenai wadah atau pun tempat perkumpulan dan pengaduan masyarakat transmigran berupa KUD.

## 2. Kerangka Analisis

Transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan UUD 1945. Transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat.<sup>24</sup>

Permasalahan ditengah masyarakat seperti kurang meratanya pembangunan, perlunya meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa, bahkan permasalahan untuk memperluas lahan produksi pangan menjadi sekelumit permasalahan yang

---

<sup>23</sup>Reza Junaidi. Penempatan Transmigrasi di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo 1975-2004. *Skripsi*. Universitas Andalas. 2012

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 1997

kemudian disebut oleh Patrice Levang sebagai ‘penyakit’ yang dihadapi pemerintah Indonesia.

Patrice Levang dalam bukunya *Ayo Ke Tanah Sebrang*, menyebutkan bahwa transmigrasi adalah ‘obat’ yang disediakan oleh pemerintah Indonesia sebagai penawar ‘penyakit’ yang terjadi di tengah masyarakatnya. Seperti halnya penyakit, permasalahan yang terjadi membutuhkan penawar, jika tidak bisa disembuhkan paling tidak bisa memperpanjang umur ‘si sekarat’.<sup>25</sup> Transmigrasi menjadi ‘obat’ untuk berbagai permasalahan itu, mulai dari ketidakseimbangan penduduk, bahkan memasuki rezim militer orde baru transmigrasi menambahkan jenis ‘penyakit’ untuk disembuhkan yaitu penyakit persatuan dan kesatuan bangsa, yang mana para petinggi menyebutnya keperluan geopolitis.

Patrice juga menambahkan bahwa transmigrasi masih menjadi sebuah perdebatan yang abadi (paling tidak selama penelitiannya selama kurang lebih dua puluh tiga tahun). Dapatkah dampak pembangunan daerah diukur dengan panjangnya jalan yang dibangun?, apakah pembauran etnis memberikan kontribusi pada persatuan dan kesatuan bangsa atau justru memperparah perpecahan bangsa?. Bagaimanapun transmigrasi merupakan masalah persepsi, tinggal percaya atau tidak. Memang itulah ciri khas yang dijadikan objek perdebatan abadi program transmigrasi.<sup>26</sup>

Transmigrasi dapat dipandang sebagai salah satu unsur dari kerangka eksperimen yang sangat penting dalam usaha pemanfaatan lahan marginal di Indonesia. Hal ini dikaitkan dengan masalah yang sangat mendesak sehubungan

---

<sup>25</sup> Patrice Hal 33

<sup>26</sup> *Ibid*

dengan peledakan penduduk di pedesaan di Jawa dan Bali, dan kadang kala masih dipandang sebagai jawaban dalam mengatasi masalah perkembangan penduduk di Jawa, walaupun pandangan semacam ini tak dapat dipertahankan lagi.<sup>27</sup>

Berbagai pengertian transmigrasi yang pernah muncul, pada umumnya menuju pada titik yang sama yaitu memindahkan penduduk, terlepas dari apa motif yang dibawa bersama program tersebut baik yang tertulis maupun hanya tersirat. Akan tetapi akan tetap ada dua pihak dengan cara pandang berbeda baik yang pro maupun kontra. Tapi paling tidak, program transmigrasi masih menjadi andalan pemerintah menghadapi ‘penyakit’ yang pernah diutarakan Patrice, terbukti dengan masih berjalannya transmigrasi meski era telah berubah, dari rezim militer penuh kepatuhan sampai zamannya untuk bebas dengan hadirnya reformasi.

Secara umum dapat dikatakan transmigrasi berarti pemindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya ke daerah lain yang masih jarang penduduknya atau bahkan yang tidak ada penduduknya. Kemudian Transmigrasi juga terbagi kedalam beberapa macam, yaitu :

a. Transmigrasi umum

Transmigrasi umum adalah transmigrasi yang seluruh biaya pelaksanaannya ditanggung oleh pemerintah.<sup>28</sup> Ada pula yang menyebut transmigrasi umum ini dengan transmigrasi dengan ‘perbekalan’ yang disediakan oleh pemerintah.

b. Transmigrasi swakarsa

---

<sup>27</sup>Arthur J. Hanson, *Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah Marjinal*. Dalam *Transmigrasi Dari Kolonisasi Sampai Swakarsa*. Jakarta: Gramedia, 1982. Hal.60

<sup>28</sup>Sujarwadi. *Transmigrasi Swakarsa, Transmigrasi Nelayan, Transmigrasi Perkebunan, dan Transmigrasi Industri*. Dalam Rukmadi Warsito, Dkk. *Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai enturan Budaya di Tempat Pemukiman*. Jakarta: Rajawali, 1984. Hal 1

Yaitu perpindahan penduduk tanpa bantuan pemerintah dan tanpa organisasi dalam bentuk apapun juga. Perpindahan serupa ini, yang pada dasarnya sama dengan perpindahan normal yang terjadi dalam suatu negara jika tidak ada penghalang-penghalang buatan, telah terjadi berabad-abad di seluruh nusantara dan akan terus berlangsung terlepas dari adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.<sup>29</sup>

Beberapa penulis yang mempelajari masalah transmigrasi, mengakui bahwa transmigran swakarsa cenderung lebih berhasil daripada transmigran umum meskipun transmigran umum mendapat bantuan dari pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mereka disebabkan oleh akal-daya dan kewiraswastaan mereka yang memungkinkan melihat dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan guna memperbaiki hidup mereka.<sup>30</sup>

Transmigrasi swakarsa ini kemudian dibagi pula menjadi beberapa macam, yaitu:

- ❖ Transmigrasi swakarsa Dengan Bantuan Biaya (DBB), pada Repelita I transmigrasi jenis ini ditanggung oleh APBN. Transmigrasi DBB ini diperlakukan sama dengan transmigran umum hanya saja biaya perjalanan ditanggung oleh masing-masing transmigran
- ❖ Transmigran swakarsa Tanpa Bantuan Biaya (TBB), dimana mereka hanya mendapat pembinaan serta pengawasan dari pemerintah. Tanah, rumah serta biaya transportasi ditanggung sendiri oleh transmigran.

---

<sup>29</sup> Joan Hardjono, *Transmigrasi Umum dan Swakarsa dalam Konteks Target-target Pelita III*. Dalam *Transmigrasi Dari Kolonisasi Sampai Swakarsa*. Jakarta: Gramedia, 1982. Hal, 170

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 175

- ❖ Transmigrasi swakarsa Bantuan Presiden (Banpres), yang mana diperuntukkan bagi penduduk yang daerah mereka terkena bencana, ataupun terpaksa ditransmigrasikan karena proyek pembangunan pemerintah.<sup>31</sup>

#### c. Transmigrasi Lokal

Transmigrasi ini hampir sama dengan transmigrasi umum yang biayanya ditanggung oleh pemerintah, bedanya adalah lokasi perpindahan yang ditempuh. Transmigrasi lokal terjadi dalam kawasan yang relatif masih sama. Perpindahan penduduk dilakukan masih dalam kawasan etnis yang sama, transmigrasi ini biasanya dilaksanakan karena adanya bencana alam yang melanda suatu desa maka penduduknya harus dipindahkan ke daerah yang tidak berpotensi bencana. Contohnya yaitu transmigrasi lokal di Nagari Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 1988-2000.<sup>32</sup>

#### d. Transmigrasi Bedol Desa

Jenis transmigrasi ini memindahkan penduduk secara masal atau kolektif terhadap satu atau bahkan banyak desa lengkap dengan semua aparatur desa bersangkutan. Biasanya transmigrasi ini dilaksanakan karena terjadinya bencana alam yang merusak tempat asal transmigran.

#### e. Transmigrasi *Bawon*

Transmigrasi ini muncul pada masa pemerintahan Hindia Belanda, biaya untuk transmigran yang diberangkatkan dibebankan kepada transmigran yang

---

<sup>31</sup> Sujarwadi. *Transmigrasi Swakarsa, Transmigrasi Nelayan, Transmigrasi Perkebunan, Dan Transmigrasi Industri*. Dalam Rukmadi Warsito dkk. "Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya Di Tempat Pemukiman". Jakarta: Gramedia, 1984

<sup>32</sup> Ocky Setiawan. *Transmigrasi Lokal di Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 1988-2000. Skripsi*. Universitas Andalas. 2005

telah menetap sebelumnya.<sup>33</sup> Di Lampung misalnya tiga keluarga transmigran yang telah menetap bertanggung jawab atas satu keluarga transmigran yang baru.

Transmigrasi jenis ini dianggap terlalu membebani transmigran, dan hanya bertahan selama periode kedua transmigrasi yaitu dalam jangka 1932-1935. Selepas dari pemerintahan Belanda program transmigrasi dengan sistem *bawon* ini tidak pernah dipakai lagi.

Pembahasan mengenai transmigrasi itu termasuk ke dalam kajian sejarah sosial. Sejarah sosial itu sendiri adalah pembahasan sejarah masyarakat atau kehidupan masyarakat di masa lampau yang dipandang melalui beragam pendekatan. Sejarah sosial pada umumnya mengupas masalah seperti kemiskinan, kelaparan, keterbelakangan. Dalam sejarah sosial terkandung pula masalah seperti halnya demografis, yaitu pertumbuhan penduduk, migrasi, urbanisasi, dan sebagainya<sup>34</sup>. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai transmigrasi yang pada dasarnya merupakan bagian dari migrasi.

Sejarah sosial mempunyai bahan garapan yang sangat luas dan beraneka-ragam. Kebanyakan sejarah sosial juga mempunyai hubungan erat dengan sejarah ekonomi sehingga menjadi semacam sejarah sosial-ekonomi.<sup>35</sup> Misalnya, bukan semata-mata sejarah dari petani, melainkan juga masyarakat desa dalam arti sosial-ekonomi.

Selain itu, sejarah sosial juga tak dapat dilepaskan dari salah satu tema pokok kemasyarakatan yaitu perubahan sosial. Sesungguhnya, proses sejarah

---

<sup>33</sup> Patrice Levang. *Op.cit* hal 16

<sup>34</sup> Sartono Kartodirdjo, dkk. *Sejarah Sosial Konseptualisasi, Model, dan Tantangannya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2013. Hal 3

<sup>35</sup> *Ibid.* Hal 11



apabila dipandang dari perspektif sejarah sosial merupakan proses perubahan sosial dari berbagai dimensi atau aspeknya. Termasuk kedalamnya yaitu proses akulturasi, artinya proses yang mencakup usaha masyarakat menghadapi pengaruh kultural dari luar dengan mencari bentuk penyesuaian.

Akulturasi dalam kehidupan bermasyarakat adalah hal yang sudah sepantasnya terjadi, terutama di daerah yang terdapat dua kelompok manusia dengan kultur atau budaya yang berbeda. Dua kelompok tersebut di satu sisi adalah mayoritas dan di sisi yang lain adalah kelompok minoritas yang harus menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas. Meskipun dengan dilaluinya proses penerimaan kultur baru yang dibawa oleh masing-masing kelompok masyarakat tersebut dan lambat laun akan dapat diterima dan menyesuaikan diri dengan kultur tersebut, namun kultur atau budaya yang mereka miliki tidak akan hilang. Hal ini karena berkaitan dengan unsur nilai-nilai budaya yang memang sudah tidak dapat diubah lagi sebab telah di anut sejak dini dalam lingkungan masyarakat masing-masing kelompok. Dalam kasus transmigrasi, dapat dicontohkan ketika masyarakat Minangkabau yang menjadi minoritas dalam kehidupan bermasyarakat transmigran, menerima kebudayaan yang dibawa oleh masyarakat Jawa yang kemudian menjadi kelompok mayoritas di daerah transmigrasi. Namun nilai-nilai budaya dasar yang masyarakat Minangkabau anut seperti aliran keturunan Matrilineal tidak akan pernah berubah meskipun masyarakat Jawa menganut sistem Patrilineal. Namun, dalam kegiatan atau perhelatan yang melibatkan banyak orang maka masyarakat Minangkabau akan memakai kultur atau cara-cara yang dipakai oleh orang Jawa, sebagai contoh

ketika digelar hajatan orang Minangkabau yang menggelar pesta juga akan menyediakan makanan khas Jawa serta hiburan yang juga merupakan budaya Jawa seperti halnya kuda lumping, dan sebagainya.

Di dalam interaksi sosial terkandung makna tentang kontak secara timbal balik. Stimulasi dan respon pada individu atau kelompok individu, dalam suatu interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Adanya kontak sosial. Kontak sosial, pada dasarnya, merupakan aksi individu atau kelompok individu yang mempunyai makna bagi pelakunya dan kemudian ditangkap oleh individu atau kelompok individu yang lain. Kontak sosial tidak saja terjadi pada jarak yang dekat, misalnya dengan berhadapan muka, sebatas jarak sesuai kemampuan panca indra manusia, tetapi juga bisa pada jarak jauh dengan menggunakan alat-alat pembantu, misalnya telepon.
2. Adanya komunikasi. Arti terpenting dari komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran atas perilaku baik yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah, atau sikap dan perasaan yang disampaikan oleh orang lain. Dengan adanya komunikasi, perilaku dan perasaan seorang individu atau kelompok individu dapat diketahui oleh individu atau kelompok individu lainnya.<sup>36</sup>

Perwujudan interaksi sosial dalam transmigrasi berupa pertemuan beberapa kelompok etnik yang kemudian hanya akan membuahkan dua alternatif, yakni

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo, 1990, hal. 67

yang bersifat positif atau negatif. Hal yang bersifat positif akan timbul bila pertemuan itu mampu menciptakan hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat baru. Kondisi ini hanya akan tercapai apabila ada rasa saling menghargai dan mengakui keberadaan masing-masing etnik. Sedangkan hal yang bersifat negatif muncul bila pertemuan itu menimbulkan suasana hubungan sosial yang tidak harmonis karena adanya perbedaan sikap dalam memandang suatu obyek yang menyangkut kepentingan bersama. Kondisi ini juga terjadi apabila adanya pemaksaan atau pendiktean suatu tata nilai ataupun norma yang baru oleh golongan yang merasa sebagai mayoritas terhadap golongan yang dianggap minoritas.<sup>37</sup>

#### **E. Metode Penelitian dan Sumber**

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan sejarah adalah metode sejarah. Dalam metode sejarah terdapat beberapa langkah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.<sup>38</sup> Metode pengumpulan data atau sumber dilakukan dengan cara studi pustaka, studi kearsipan dan studi lapangan. Hal ini terkait dengan jenis sumber yaitu sumber tulisan dan sumber lisan. Sumber tulisan dapat dilakukan dengan studi pustaka dan studi kearsipan.

Studi pustaka yaitu pengumpulan data atau bahan-bahan tertulis seperti mengambil sumber-sumber dari skripsi yang telah ada sebelumnya dan buku-buku yang berkaitan dengan transmigrasi. Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan

---

<sup>37</sup> Chodidah Budi Raharjo, *op.cit.* hal 144

<sup>38</sup> Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press, 1986, hal 35.

Jurusan Ilmu Sejarah Unand, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Unand, dan Perpustakaan Pusat Unand.

Untuk mendukung sumber tertulis maka juga digunakan sumber lisan melalui studi wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema yang dibahas. Seperti, Walinagari, kepala jorong, Ninik-mamak, dinas terkait, serta warga baik dari transmigran maupun masyarakat sekitar lokasi.

Setelah pengumpulan sumber kemudian dilakukan tahap kedua dari metode sejarah yaitu: proses kritik terhadap sumber yang telah didapat atau diperoleh. Proses kritik dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran dari sumber-sumber yang ada, sehingga melahirkan suatu fakta. Kritik terdiri dari dua yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik ekstern ditujukan untuk melihat keotentikan atau keaslian sumber. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat atau meneliti kertasnya, tinta, gaya penulisan, bahasa, kalimat, ungkapan, kata-kata, huruf dan semua penampilan luarnya.<sup>39</sup> Kritik intern ditujukan untuk melihat kredibilitas dari sumber tersebut. Berdasarkan kritik sumber tersebut didapatkan fakta sejarah.

Langkah selanjutnya adalah proses interpretasi berupa penafsiran yang berkaitan dengan fakta-fakta sejarah. Dalam interpretasi terdapat dua komponen yaitu analisis dan sintesis. Analisis yaitu menghubungkan antara beberapa fakta yang ada sehingga terjadi hubungan kausalitas yang kompleks dan saling mempengaruhi, sedangkan sintesis merupakan hasil dari pernyataan analisis. Tataran interpretasi ini akan berkaitan dengan pendekatan yang sesuai dengan tema yang dibahas.

---

<sup>39</sup> Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: yayasan Benteng Budaya, 1995. Hal 99

Setelah dilakukan interpretasi dengan menghubungkan satu fakta dengan fakta lainnya, dilanjutkan dengan tahap terakhir dari metode sejarah yaitu proses penulisan atau historiografi. Suatu penulisan dari sumber-sumber yang didapat yang telah di kritik dan diinterpretasikan. Metode penulisan ini diarahkan pada penulisan sejarah yang bersifat deskriptif naratif.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini nantinya akan berisi 5 bab pokok, yang antara satu sama lain saling berhubungan. Bab satu memuat pengantar serta alasan pemilihan topik penulisan itu sendiri. Kemudian diuraikan pula mengenai latar belakang masalah yang diangkat, diikuti dengan pembatasan yang ditetapkan yaitu pembatasan temporal atau waktu dan pembatasan spasial atau tempat. Selain itu juga dijabarkan tentang tujuan dan manfaat dari penelitian, disertai studi relevan dan tinjauan pustaka. Metode penelitian serta bahan sumber juga dikaji pada Bab 1.

Pada Bab dua, akan dijabarkan mengenai gambaran umum Nagari Kamang sebagai daerah tempatan transmigrasi. Akan dikemukakan pula tentang gambaran umum setiap UPT yang ada di Nagari Kamang beserta gambaran awal setiap UPT bersangkutan, seperti asal daerah transmigran.

Bab tiga, membahas mengenai jalannya transmigrasi di Nagari Kamang yang menjadi batasan spasial penelitian. Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai awal kedatangan transmigran asal Jawa hingga tahun-tahun terakhir mendekati batasan akhir penelitian yaitu 2007. Selain itu juga akan dibahas mengenai bentuk

adaptasi dan interaksi yang dilakukan transmigran serta perubahan-perubahan sosial maupun ekonomi yang dialami transmigran.

Pada Bab empat, khusus membahas mengenai adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa dengan penduduk disekitar lokasi penempatan transmigrasi yang dalam hal ini bentuk adaptasi tersebut adalah dengan melaksanakan budaya *malokok*.

Pada bab lima, akan disimpulkan bagaimana kehidupan masyarakat baik transmigran maupun masyarakat sekitar daerah transmigrasi setelah berjalannya program transmigrasi. Kesimpulan memuat semua yang menjadi jawaban permasalahan yang telah lebih dulu dikaji dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan menjadi penutup dari rangkaian penulisan.

